

PERAN PEMERINTAH DESA TAJURHALANG KAB. BOGOR DALAM MENJAGA KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA

Sarifurrohman Alfaiz

Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

email: sarifurohmanalfaiz304@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Desa Tajurhalang, Kabupaten Bogor, dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Latar belakang penelitian ini berangkat dari dinamika hubungan antarumat beragama di Indonesia yang kerap diwarnai konflik. Sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menciptakan harmoni sosial di tengah keberagaman agama. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memahami langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tajurhalang dalam menjaga dan memperkuat toleransi antarumat beragama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi agama. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan pemerintah desa dan tokoh agama, serta studi literatur terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam strategi yang diterapkan dalam mengelola keberagaman agama di tingkat desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung efektivitas kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tajurhalang aktif dalam menjaga kerukunan antarumat beragama melalui berbagai strategi. Beberapa di antaranya adalah penyelenggaraan kegiatan sosial seperti gotong royong, pengobatan gratis, dan santunan bagi anak yatim, serta pembinaan remaja berbasis moderasi beragama. Selain itu, pemerintah desa menginisiasi pertemuan triwulanan dengan tokoh agama, mengelola alokasi dan pembatasan rumah ibadah, serta mendorong dialog antarumat beragama. Upaya ini didukung oleh pemanfaatan kondisi sosial dan budaya lokal, sehingga menciptakan suasana harmonis di masyarakat. Dengan demikian, Desa Tajurhalang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola keberagaman agama.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Kerukunan Antarumat Beragama, Toleransi, Kebijakan.

Abstract:

This study aims to describe and analyze the role of the Tajurhalang Village Government, Bogor Regency, in maintaining inter-religious harmony. The background of this research stems from the dynamics of inter-religious relations in Indonesia, which are often characterized by conflict. As the closest government unit to the community, the village government has a strategic role in creating social harmony amid religious diversity. Therefore, this research seeks to understand the steps taken by the Tajurhalang Village Government in maintaining and strengthening inter-religious tolerance. This research uses a qualitative method with a sociology of religion approach. Data were collected through direct observation, interviews with the village government and religious leaders, and the study of related literature. This approach allowed the researcher to explore in depth the strategies applied in managing religious diversity at the village level and identify the factors that support the effectiveness of the policy. The results show that the Tajurhalang Village Government is active in maintaining inter-religious harmony through various strategies. Some of these include organizing social activities such as gotong royong, free medical treatment, and compensation for orphans, as well as fostering youth based on religious moderation. In addition, the village government initiated quarterly meetings with religious leaders, managed the allocation and limitation of houses of worship, and encouraged interfaith dialog. These efforts are supported by the utilization of local social and cultural conditions, thus creating a harmonious atmosphere in the community. Thus, Tajurhalang Village can serve as an example for other regions in managing religious diversity.

Keywords: Village Government, Interfaith Harmony, Tolerance, Policy.

Pendahuluan

Desa Tajurhalang, yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu wilayah yang memiliki dinamika sosial keagamaan yang cukup kompleks. Keberadaan 23 masjid, 10 gereja, satu pemukiman etnis Tionghoa, dan ikon Buddha berupa Patung Buddha Tidur di Vihara Buddha Dharma & 8 Pho Sat menjadikan desa ini sebagai cerminan keberagaman yang nyata di tingkat lokal. Keragaman agama dan kepercayaan yang ada di Tajurhalang menciptakan sebuah ruang sosial yang menuntut adanya kesadaran kolektif mengenai pentingnya toleransi, penghormatan terhadap keyakinan masing-masing, serta pengelolaan perbedaan yang bijak agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai¹.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena-fenomena sosial yang muncul di Tajurhalang sebagai akibat dari dinamika keberagaman tersebut.

¹ Ibnu Rusydi & Siti Zolehah, "Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesian", *Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra*, Vol. 1, No. 1 (2018): 171.

Tercatat adanya beberapa peristiwa penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah, baik gereja maupun masjid (seperti Masjid LDII), yang mengindikasikan masih adanya sikap intoleran di kalangan sebagian masyarakat. Dalam catatan lapangan, penulis menemukan sedikitnya lima kali penolakan terhadap pembangunan gereja dan satu kali terhadap pembangunan masjid, yang mayoritas disebabkan oleh faktor lokasi yang saling berdekatan serta ketegangan akibat perbedaan keyakinan. Realitas sosial ini memunculkan pertanyaan besar mengenai bagaimana sebenarnya mekanisme pengelolaan kerukunan antarumat beragama di tingkat desa, dan sejauh mana aparat pemerintah desa berperan dalam menciptakan suasana damai di tengah keberagaman tersebut².

Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti peran Pemerintah Desa Tajurhalang sebagai pihak yang memiliki kewenangan langsung terhadap warganya. Pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan administratif, melainkan juga menjadi fasilitator dan mediator dalam menyelesaikan konflik serta menjaga harmoni sosial³. Berdasarkan regulasi yang ada, terutama Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, tanggung jawab untuk menjaga kerukunan umat beragama tidak hanya berada di pundak kepala daerah tingkat kabupaten atau kota, tetapi juga dilimpahkan hingga ke tingkat camat dan kepala desa/lurah⁴. Ini menjadikan kepala desa sebagai garda terdepan dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam ranah kehidupan keagamaan.

Pemerintah Desa Tajurhalang menyadari pentingnya peran tersebut dan telah berupaya secara aktif menjalankan fungsinya melalui strategi-strategi yang berbasis pada kondisi lokal. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah menginisiasi program “Desa Toleransi Beragama,” sebuah konsep yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan nyata seperti dialog lintas agama, penyuluhan nilai-nilai toleransi di masyarakat, serta penegakan aturan yang mendukung kerukunan antarumat beragama. Program ini bahkan telah diajukan hingga ke tingkat

² Fadil Muhammad, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 26 Juli 2024.

³ Carsam, “Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural”, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 2 (2016): 188.

⁴ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 35.

provinsi dan pemerintah pusat melalui koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor⁵.

Namun, meskipun terdapat berbagai inisiatif yang menjanjikan, upaya menjaga kerukunan di tingkat desa tetap menghadapi tantangan yang tidak ringan. Selain faktor perbedaan keyakinan, terdapat pula faktor ketidakpahaman terhadap ajaran agama lain, pengaruh kelompok ekstrem, dan isu-isu sosial-politik yang berpotensi memicu konflik horizontal. Bahkan dalam beberapa kasus, terdapat kesalahpahaman dalam penafsiran regulasi terkait pendirian rumah ibadah, yang berujung pada resistensi masyarakat terhadap pembangunan tempat ibadah tertentu. Situasi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan hak konstitusional warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing⁶.

Dalam realitas sosial di Tajurhalang, konsep kerukunan antarumat beragama tidak dapat dipahami secara hitam-putih. Kerukunan bukanlah kondisi yang statis, tetapi merupakan hasil dari proses sosial yang terus-menerus dibangun melalui komunikasi, dialog, dan kebijakan yang inklusif⁷. Peran aktif kepala desa dalam membangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi keagamaan menjadi salah satu kunci dalam menciptakan suasana yang kondusif. Kepala desa juga dituntut untuk memiliki sensitivitas sosial yang tinggi, memahami potensi-potensi gesekan yang ada, serta merumuskan solusi yang adil dan tidak memihak agar semua pihak merasa dihargai dan dilindungi⁸.

Berdasarkan observasi lapangan, penulis menemukan bahwa Pemerintah Desa Tajurhalang memiliki komitmen kuat dalam menjaga stabilitas sosial keagamaan melalui pendekatan-pendekatan yang adaptif dan partisipatif⁹. Misalnya, ketika terjadi penolakan terhadap pembangunan gereja, kepala desa bersama tokoh masyarakat setempat segera menginisiasi forum dialog untuk menengahi ketegangan dan mencari titik temu. Dalam beberapa kasus, pendekatan persuasif ini terbukti mampu meredam konflik sebelum

⁵ Tim Redaksi, *Pemkab Bogor Ingin Tularkan Konsep “Desa Toleransi Beragama”* dari <https://www.antaranews.com/berita/3429714/pemkab-bogor-ingin-tularkan-konsep-desa-toleransi-beragama> (diakses pada 10 Mei 2024, jam 10.35 WIB).

⁶ Masykuri Abdilah, *Islam Agama Kedamaian: Merawat Kemajemukan dan Kerukunan di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2021), 35.

⁷ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 35.

⁸ Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*, (Jakarta: Prenada, 2011), 111.

⁹ M. Ridwan Lubis, *Kerukunan Beragama dalam Cita dan Fakta*, (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama [FKUB], 2016), 189.

berkembang lebih jauh. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memahami substansi regulasi yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan hak konstitusional warga negara, agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan isu-isu keagamaan yang sensitif.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana Pemerintah Desa Tajurhalang menjalankan perannya dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Fokus utama penelitian adalah pada strategi, kebijakan, serta praktik-praktik sosial yang diterapkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang harmonis di tengah keberagaman agama yang ada¹⁰. Selain itu, penelitian ini juga hendak mengungkap tantangan-tantangan yang dihadapi serta bagaimana dinamika sosial tersebut berdampak terhadap kohesi sosial masyarakat desa.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan model pengelolaan kerukunan umat beragama di tingkat desa yang tidak hanya efektif, tetapi juga relevan dengan konteks lokal. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan publik terkait kehidupan keagamaan di Indonesia. Pada akhirnya, kerukunan yang sejati bukan hanya sebatas tidak adanya konflik, tetapi tercermin dari terciptanya rasa saling menghargai, saling mendukung, dan hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan yang ada.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di Desa Tajurhalang, khususnya terkait dengan peran pemerintah desa dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur gejala secara statistik, melainkan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami makna dari peristiwa sosial yang kompleks, sebagaimana dipahami oleh individu atau kelompok masyarakat yang menjadi subjek penelitian¹¹. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa interaksi sosial, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap keberagaman agama serta bagaimana peran pemerintah desa hadir dalam dinamika tersebut¹².

¹⁰ M. Ridwan Lubis, *Buku Ajar Merawat Kerukunan Pengalaman Indonesia*, (Jakarta: UIN Jakarta Press 2018), 15.

¹¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 102.

¹² John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (New Delhi: SAGE Publications, 1998), 52.

Dalam upaya menganalisis fenomena ini, pendekatan sosiologis digunakan sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas berbagai unsur, termasuk struktur sosial, institusi, dan norma yang saling memengaruhi¹³. Dalam konteks Desa Tajurhalang, pendekatan sosiologis membantu peneliti untuk melihat bagaimana hubungan antarumat beragama terbentuk dan berkembang, serta bagaimana nilai-nilai agama memengaruhi interaksi sosial dan pola kehidupan masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga mengkaji bagaimana pemerintah desa sebagai agen sosial memainkan peran strategis dalam membangun komunikasi lintas agama, memediasi perbedaan, serta mengelola potensi konflik yang muncul dari keberagaman keyakinan¹⁴.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi lapangan, wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi¹⁵. Observasi dilakukan secara langsung di Desa Tajurhalang untuk mengamati kondisi sosial keagamaan serta peran dan aktivitas pemerintah desa dalam menciptakan suasana yang harmonis antarumat beragama. Peneliti mencermati berbagai program kerja, kebijakan lokal, serta dinamika kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai dasar awal untuk memahami konteks penelitian. Wawancara dilakukan terhadap sepuluh narasumber, terdiri atas lima orang aparat pemerintah desa, tiga tokoh agama, dan dua warga masyarakat yang dianggap memahami isu kerukunan beragama di wilayah tersebut. Melalui wawancara ini, peneliti mendapatkan informasi primer yang mendalam dan tidak tersedia dalam sumber-sumber tertulis. Selain itu, studi pustaka dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis dan memahami berbagai temuan sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Sumber yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan tulisan-tulisan akademik lainnya. Metode dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen resmi, notulensi rapat, foto kegiatan, arsip desa, serta publikasi yang berkaitan dengan program-program kerukunan umat beragama.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul dari berbagai teknik diolah secara sistematis untuk menggambarkan dan memahami realitas sosial di lapangan¹⁶.

¹³ M. Ira, "Urgensi Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam", *Journal Of Legal And Cultur Analytics*, Vol. 1, No. 2, (2022): 89.

¹⁴ Puji Qomariyah, *Teori Ringkas Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 89.

¹⁵ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal At-Taqaddam*, Vol. 8, No. 1, (Juli 2016): 21.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: PT Alfabet, 2016), 78.

Proses analisis dilakukan dengan mengkategorikan data berdasarkan tema yang relevan, seperti bentuk interaksi antarumat beragama, kebijakan pemerintah desa, serta strategi yang diterapkan dalam membangun dan mempertahankan kerukunan. Hasil wawancara dianalisis untuk mengidentifikasi peran-peran yang dijalankan oleh aktor-aktor lokal, seperti tokoh agama dan aparat desa, serta cara mereka berinteraksi dalam menciptakan suasana toleran dan damai. Temuan dari observasi dianalisis untuk melihat bagaimana praktik kehidupan sehari-hari masyarakat mencerminkan atau bertentangan dengan nilai-nilai toleransi. Sementara itu, dokumen dan arsip desa diperiksa untuk mendukung dan menguatkan hasil dari data primer, sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh dan kontekstual¹⁷.

Melalui pendekatan dan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai dinamika sosial keagamaan di Desa Tajurhalang, serta bagaimana peran aktif pemerintah desa menjadi faktor penting dalam membina harmoni antarumat beragama di tengah masyarakat yang majemuk.

Hasil dan Diskusi

Regulasi Pemerintah terhadap Kerukunan Umat Beragama

Desa Tajurhalang merupakan salah satu desa di Indonesia yang memiliki tingkat heterogenitas keagamaan yang tinggi. Hal ini ditandai dengan adanya kawasan khusus bagi masyarakat penganut Konghucu, Buddha, Hindu, dan Kristen yang hidup berdampingan dengan mayoritas Muslim¹⁸. Keberagaman ini menjadikan Tajurhalang sebagai contoh nyata kerukunan antarumat beragama di tingkat desa, sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam mempertahankan harmoni sosial yang telah terbangun¹⁹.

Dalam upaya menjaga kerukunan, pemerintah Desa Tajurhalang menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadil Muhammad, S.E. selaku Kasi Kesra Desa Tajurhalang, salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antara pemangku kebijakan:

"Banyak kasus urbanisasi yang tidak terdata dengan baik. Ketidaktahuan terhadap pendatang baru ini menimbulkan potensi risiko

¹⁷ Moleong, L. J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 145.

¹⁸ Data Desa Tajurhalang, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, Tahun 2017.

¹⁹ Weinata Sairin, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa : Butir- Butir Pemikiran*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2011), 34.

yang dapat mengganggu stabilitas sosial, termasuk adanya infiltrasi kelompok radikal yang sempat terdeteksi di wilayah desa."²⁰

Kepala Desa Tajurhalang, Saipudin, S.Ag., mengidentifikasi tantangan lain berupa fanatisme keagamaan yang tidak mendasar:

"Pemerintah desa harus berada di posisi netral dan adil dalam menyikapi segala bentuk perbedaan agama. Namun, upaya menjaga keseimbangan ini sering kali menghadapi kendala dari berbagai pihak."²¹

Tantangan lain datang dari perbedaan budaya dan tradisi, sebagaimana diungkapkan oleh Ervin, Ketua RT di Dusun 4:

"Masing-masing agama memiliki budaya dan tradisi sendiri yang terkadang menimbulkan ketidaknyamanan dalam interaksi sosial. Sebagai contoh, dalam tradisi Konghucu, ada adat tertentu dalam prosesi kematian yang membuat sebagian umat Muslim merasa canggung untuk ikut berbelasungkawa, begitu juga sebaliknya."²²

Pendeta Joko Sugiri, tokoh agama Kristen di Desa Tajurhalang, menekankan tantangan dari sisi pemuka agama:

"Tantangan utama yang dihadapi oleh para pemuka agama adalah bagaimana menjaga umat mereka agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan. Fanatisme yang berlebihan sering kali menjadi pemicu konflik dan menghambat terciptanya dialog antarumat beragama yang lebih sehat."²³

Strategi dan Program Pemerintah Desa dalam Menjaga Kerukunan

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah Desa Tajurhalang telah mengembangkan strategi dan program yang dapat dikategorikan dalam tiga aspek utama: proteksi, fasilitasi, dan regulasi.

1. Strategi Proteksi

a. Pendekatan Emosional

Pemerintah desa menerapkan pendekatan emosional melalui silaturahmi rutin untuk membangun hubungan yang mendalam dengan masyarakat. Kepala Desa Tajurhalang, Saipudin, S.Ag., mengungkapkan:

"Kami sering duduk bareng atau ngopi bareng dengan masyarakat untuk tujuan mendengarkan keluhan/masukan dari masyarakat. Tanpa disadari dengan itu kami membangun hubungan emosional dengan masyarakat yang merasa kurang diperhatikan."²⁴

²⁰ Fadil Muhammad, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 26 Juli 2024.

²¹ Saipudin, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 23 Juli 2024.

²² Ervin, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 27 Juli 2024.

²³ Joko Sugiri, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 23 Juli 2024.

²⁴ Saipudin, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 23 Juli 2024.

Pendekatan ini bertujuan membangkitkan naluri alami manusia untuk saling memahami, menghargai, dan menumbuhkan rasa kasih sayang serta kejujuran dalam masyarakat.

b. Keadilan dan Kesejahteraan Bersama

Pemerataan akses terhadap sumber daya desa menjadi prioritas pemerintah desa dalam mewujudkan keadilan sosial. Fadil Muhammad, S.E. menjelaskan:

*"Pemerintah Desa juga bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif bagi perdamaian desa. Langkah-langkah yang masih konsisten sampai sekarang seperti menyediakan pembangunan yang merata dan meningkatkan akses terhadap layanan publik seperti membuat pembangunan jalan, tempat bermainnya warga, fasilitas umum, taman bacaan dan fasilitas wi-fi yang tersedia secara gratis."*²⁵

Ustad Bayan Rahman, S.Ag., tokoh agama setempat, menambahkan:

*"Kepala desa sendiri sangat ingin setiap individu masyarakat makmur dan sejahtera. Pembatasan ternak babi hingga bantuan rumah ibadah dan renovasi rumah warga kurang mampu ini membuktikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan manfaat yang baik."*²⁶

c. Safari/Keliling dalam Kegiatan Keagamaan

Program safari keagamaan yang diinisiasi oleh Kepala Desa mendapat respons positif dari berbagai kelompok agama. Nihai, tokoh agama Konghucu, mengungkapkan:

*"Kalau dari pemerintah desa selama ini cukup mengayomi dari segala kebijakan dan program yang dikeluarkan karena kalau setiap perayaan tahun baru imlek kadang-kadang dari pihak kepolisian, dari aparat desa ikut andil juga, dan ada orang Muslim juga datang ikut merayakan hari kebesaran kita dan di setiap kegiatan keagamaan."*²⁷

d. Pemerataan Pembangunan Desa

Pembangunan yang merata menjadi strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kecemburuan sosial. Saipudin, S.Ag. menjelaskan upaya pemerintah desa:

*"Kami berupaya secara mandiri dan bekerjasama dengan organisasi eksternal, contoh: Wahid Foundation sebagai mitra dengan hadirnya kampung damai. Mereka memiliki program ruinitas dalam bidang ekonomi, memiliki kelompok pemerolehan ekonomi, ada bidang pendidikan mereka punya kontribusi juga, pertama untuk memotivasi masyarakat serta bertujuan yang sama."*²⁸

²⁵ Fadil Muhammad, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 26 Juli 2024.

²⁶ Bayan Rahman, Wawancara oleh Penulis, Desa Tanjunghalang, 23 Juli 2024.

²⁷ Nihai, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 24 Juli 2024.

²⁸ Saipudin, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 23 Juli 2024.

e. Program Bimtek/Workshop Rutin

Pemerintah desa mengadakan bimbingan teknis dan workshop secara berkala tentang berbagai isu seperti terorisme, radikalisme, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pengelolaan konflik. Program ini melibatkan berbagai organisasi seperti FKUB, KUA, MUI, LPPA, BNPT, dan kepolisian. Fadil Muhammad, S.E. menyatakan:

"Dalam mencegah radikalisme, kekerasan pada perempuan dan anak, untuk mewujudkan hal tersebut, kita bekerjasama dengan pihak lain seperti di Kabupaten ada FKUB, KESBANGPOL, BPNT, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan Wahid Foundation."²⁹

Masyarakat juga memberikan masukan untuk materi yang dibahas dalam program ini. Yesaya Nugroho, salah satu warga, menyarankan:

"Perlu menambah program pembinaan bagi anak remaja atau materi pembahasan yang berkaitan dengan narkoba dan minuman keras."³⁰

f. Pembinaan Kampung Damai

Kerjasama dengan Wahid Foundation sejak 2017 telah melahirkan inisiatif "Kampung Damai" yang diresmikan pada 2 Februari 2018. Pendeta Joko Sugiri menjelaskan:

"Kita di desa Tajurhalang ini menjadi percontohan desa damai yang di wadahi Wahid Foundation berkerja sama dengan pemerintah desa. Ini jadi salah satu sarana bagaimana kerukunan antar umat beragama terjalin dan itu di beranggotakan dari beberapa latar belakang agama yang berbeda."³¹

Pada awalnya, program ini mendapat penolakan dari beberapa kelompok masyarakat. Saipudin, S.Ag. mengungkapkan:

"Kerjasama untuk membangun kampung damai yang awalnya ada penolakan tapi dengan visi misi yang di bawa serta peluang untuk hidup rukun jadi diterima oleh semua elemen agama."³²

Fadil Muhammad, S.E. menambahkan:

"Pada awalnya mereka menolak beberapa program salah satunya program desa damai, karena mereka berpikir bahwa desa kita ini sudah aman-aman saja, tidak ada gesekan, tapi mereka belum tahu kedepannya bagaimana."³³

2. Strategi Fasilitasi

a. Silaturahmi Lintas Agama

Pemerintah desa rutin mengadakan silaturahmi lintas agama untuk menjaga hubungan antarumat beragama. Saipudin, S.Ag. menegaskan:

²⁹ Fadil Muhammad, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 26 Juli 2024.

³⁰ Yesaya Nugroho, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 27 Juli 2024.

³¹ Joko Sugiri, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 23 Juli 2024.

³² Saipudin, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 23 Juli 2024.

³³ Fadil Muhammad, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 26 Juli 2024.

"Salah satu strategi untuk menjaga kerukunan adalah dengan terus merajut silaturahmi dengan berbagai macam momen yang disesuaikan, seperti hari besar keagamaan, hari besar nasional, dan kegiatan rutin seperti gotong royong dan lomba 17 Agustus. Ini juga bentuk Pemerintah Desa sebagai mediator dan fasilitator."

b. Memfasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan

Pemerintah desa aktif memfasilitasi kegiatan keagamaan dan pendidikan bagi seluruh kelompok agama. Fadil Muhammad, S.E. menjelaskan:

*"Fasilitas untuk kumpul-kumpul masyarakat dari Dusun hingga Rt/Rw, membantu dalam proses pembangunan pendidikan desa, kegiatan keagamaan. Kerjasama antar organisasi-organisasi seperti FKUB, PKUB, MUI, ONIBUSLAW, Dinas Kependidikan, LSM dan sebagainya."*³⁴

Saipudin, S.Ag. menekankan pentingnya pendidikan:

*"Kami juga mendorong masyarakat untuk memahami bahwa penting pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan kedepannya. Maka dari pendidikan pun juga akan dapat memahami, mengerti, dan merasakan bahwa hidup saling berdampingan itu akan damai."*³⁵

c. Forum Diskusi Antaratokoh Agama

Pemerintah desa secara rutin mengadakan forum diskusi antaratokoh agama setiap tiga bulan sekali. Ustad Ruslan Abdul Majid, S.Sos.i, Ketua MUI Desa Tajurhalang, menyatakan:

*"Pemerintah Desa rutin mengundang tokoh-tokoh agama untuk komunikasi dan juga berbagi informasi terkait masalah di lingkungan, paling tidak 6 bulan atau 3 bulan sekali itu ada biasanya pertemuan para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat."*³⁶

Pendeta Joko Sugiri menambahkan:

*"Kebijakan yang dikeluarkan melibatkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat pada saat pertemuan rutin setiap 3 bulan sekali. Ini menjadi hal bagus juga karena tidak selamanya akan bertahan kebijakan tersebut karena permasalahan yang terjadi juga berkembang, maka kebijakan itu tetap relevan dengan permasalahannya. Kebijakan ini membuat masyarakat menjadi teratur."*³⁷

3. Strategi Regulasi

a. Pengalihan Hewan Ternak

Pemerintah desa mengeluarkan kebijakan pembatasan pemeliharaan hewan ternak babi dan mengalihkannya ke ternak jangkrik untuk

³⁴ Fadil Muhammad, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 26 Juli 2024.

³⁵ Saipudin, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 23 Juli 2024.

³⁶ Ruslan Abdul Majid, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 23 Juli 2024.

³⁷ Joko Sugiri, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 23 Juli 2024.

mengatasi masalah polusi udara dan konflik kepentingan. Saipudin, S.Ag. menyatakan:

*"Ketika sebelum saya menjabat ada satu dusun yang sangat tertinggal, sangat kumuh ketika kita masuk. Mereka memiliki ternak babi, sekarang kita alihkan ke ternak jangkrik."*³⁸

Satibi, Kepala Dusun 4, menambahkan:

*"Pemerintah Desa mengeluarkan kebijakan terhadap kampung cina/kampung damai ini yang dimana warganya bertenak hewan babi maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan ternak hewan babi."*³⁹

b. Membantu Percepatan Proses Legalitas Rumah Ibadah

Pemerintah desa memberikan dukungan dan memfasilitasi legalisasi rumah ibadah untuk mencegah konflik. Jayadi, Kasi Pembangunan Desa Tajurhalang, menjelaskan:

*"Pemerintah desa memberikan dukungan penuh dan memfasilitasi bagi kelompok agama minoritas yang ingin membangun rumah ibadahnya, salah satu contohnya dengan mempermudah perizinan pendirian rumah ibadah."*⁴⁰

Saipudin, S.Ag. menambahkan:

*"Memang yang sebelumnya terjadi gesekan-gesekan terutama dalam hal pembangunan rumah ibadah. Kita sering memberikan pemahaman, sering melakukan pembinaan yang sebelumnya ada gesekan-gesekan, pemaksaan-pemaksaan dari pihak-pihak tertentu, tapi sekarang mereka sudah menyadari dan harus sesuai dengan aturan yang sudah ada ketika mau mendirikan rumah ibadah di Desa Tajurhalang."*⁴¹

Bayan Rahman, S.Ag., tokoh agama setempat, menjelaskan:

*"Pada periode pertama pemerintah desa mengeluarkan pembatasan pendirian rumah ibadah di wilayah dusun 4 terutama 'kampung cina/kampung damai' karena sudah overload untuk satu wilayah mempunyai rumah ibadah yang banyak. Kebijakan ini juga bekerjasama dengan desa tetangga dimana desa kalisuren berbatasan dengan kampung cina dan merasakan imbasnya rumah ibadah yang overload."*⁴²

³⁸ Saipudin, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 23 Juli 2024.

³⁹ Satibi, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 27 Juli 2024.

⁴⁰ Jayadi, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 27 Juli 2024.

⁴¹ Saipudin, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 23 Juli 2024.

⁴² Bayan Rahman, diwawancarai oleh Sarifurrohman Alfaiz, Desa Tanjunghalang, 23 Juli 2024.

Sinergitas Pemerintah Desa dengan Lembaga Eksternal

Dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, pemerintah Desa Tajurhalang menjalin sinergitas dengan berbagai lembaga eksternal. Beberapa lembaga yang bekerjasama dengan pemerintah desa antara lain:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Pemerintah desa bekerjasama dengan MUI Pusat dan Kabupaten Bogor dalam membina para pemuka agama Islam di lingkungan desa. Pertemuan antara MUI dan pemuka agama setempat dijadwalkan sebulan sekali untuk mempererat silaturahmi dan menyatukan visi dakwah yang menekankan cinta damai dan hidup dalam kerukunan.
2. Densus 88 dan BNPT
Setelah terjadinya kasus terorisme yang melibatkan oknum masyarakat Desa Tajurhalang beberapa tahun lalu, Densus 88 dan BNPT memberikan perhatian khusus dengan mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dan mencegah radikalisme.
3. Kesbangpol Kabupaten Bogor
Pemerintah desa menggandeng Kesbangpol Kabupaten Bogor untuk memberdayakan perangkat desa dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang mempererat kerukunan dan keharmonisan antarwarga. Saefudin, Kepala Desa Tajurhalang, berharap sosialisasi dan workshop yang diadakan bersama Kesbangpol, Densus 88, dan BNPT dapat membuat masyarakat hidup rukun dan menjauhi kegiatan negatif.
4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Pemerintah desa rutin berkoordinasi dengan FKUB Kabupaten Bogor dalam mengadakan diskusi, sosialisasi, dan workshop untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama. FKUB memfasilitasi dialog antarumat beragama untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi, khususnya terkait perizinan pembangunan rumah ibadah. Fadil Muhammad, Kasi Kesra Desa Tajurhalang, mengklarifikasi bahwa kesulitan perizinan rumah ibadah bukan disebabkan oleh penolakan dari pihak desa atau warga setempat, melainkan karena belum terpenuhinya persyaratan, seperti minimum 90 jamaah di sekitar lingkungan tersebut⁴³.
5. Wahid Foundation
Pemerintah desa menjalin kerjasama dengan Wahid Foundation untuk mewujudkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan melalui penguatan

⁴³ Fadil Muhammad, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 26 Juli 2024.

pandangan, workshop rutin, dan pemberdayaan perempuan. Wahid Foundation berkomitmen menjadikan Desa Tajurhalang sebagai percontohan "Kampung Damai."

Workshop yang diselenggarakan bersama melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk Pokja Desa Damai, Penyuluhan Agama, Babinsa, Bhabinkamtibmas, kelompok perempuan, pemuda, dan tokoh masyarakat. Saefudin, Kepala Desa Tajurhalang, sangat mengapresiasi program yang digagas oleh Wahid Foundation dan berharap program ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lain dalam mewujudkan kampung damai yang syarat akan nilai-nilai toleransi dan keharmonisan⁴⁴.

Hasil dan Dampak Strategi Kerukunan

Berbagai strategi dan program yang diterapkan oleh pemerintah Desa Tajurhalang telah memberikan dampak positif bagi keharmonisan antarumat beragama. Satibi, Kepala Dusun 4, menyatakan:

*"Respon masyarakat Desa Tajurhalang boleh dikatakan 80% positif, berarti puas dari kebijakan dan program yang dikeluarkan pemerintah desa."*⁴⁵

Ervin, Ketua RT Dusun 4, menambahkan:

*"Program-program Kepala Desa apapun itu tidak jadi masalah selama programnya baik, dan pasti masyarakat selalu mendukung. Semua masyarakat ikut serta dan mendukung dalam semua kegiatan selagi itu baik."*⁴⁶

Pemerintah desa juga berhasil mengatasi tantangan fanatisme dan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Jayadi, Kaur Perencanaan Desa Tajurhalang, mengungkapkan bahwa pada awalnya terdapat perbedaan pandangan yang tajam dalam masyarakat terkait isu-isu keberagaman. Namun, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat, perbedaan tersebut dapat dikelola dengan baik, sehingga diskriminasi berbasis suku, ras, dan agama semakin berkurang.

Keberhasilan Desa Tajurhalang dalam menjaga kerukunan antarumat beragama tidak lepas dari peran aktif masyarakat dan sinergitas dengan berbagai lembaga eksternal. Pendekatan yang komprehensif, melibatkan dialog antarumat beragama, dan fokus pada pembangunan berkelanjutan

⁴⁴ Admin, *Desa Tajurhalang, Bogor Susun Rencana Aksi Desa Damai Tahun 2024-2025*, dari <https://wahidfoundation.org/news/detail/desa-tajurhalang-bogor-susun-rencana-aksi-desa-damai-tahun-2024-2025> (diakses pada 26 Februari 2025 jam 17.20 WIB).

⁴⁵ Satibi, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 27 Juli 2024.

⁴⁶ Ervin, Wawancara oleh Penulis, Desa Tajurhalang, 27 Juli 2024.

menjadi kunci kesuksesan dalam mempertahankan harmoni sosial di tengah keberagaman.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa Tajurhalang, Kabupaten Bogor, sangat krusial dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di tengah dinamika keberagaman yang ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa, bersama tokoh masyarakat, berfungsi sebagai penggerak utama dalam membangun sikap saling menghormati dan menghargai antarwarga. Melalui berbagai strategi, seperti kegiatan sosial, pembinaan remaja berbasis moderasi beragama, dan dialog antarumat, pemerintah desa berhasil menciptakan suasana harmonis di masyarakat.

Keterlibatan aktif tokoh agama dan masyarakat dalam gotong royong, perayaan hari besar keagamaan, serta musyawarah antarumat beragama menjadi bukti nyata dari kerjasama yang terjalin. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga menciptakan rasa kepedulian yang mendalam terhadap sesama, tanpa memandang perbedaan agama. Dengan demikian, Desa Tajurhalang dapat dijadikan contoh bagi daerah lain dalam mengelola keberagaman agama, menunjukkan bahwa dengan kerjasama yang efektif, kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai dapat terjaga. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah desa dalam menciptakan harmoni sosial, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Referensi

- 'Adl, Afif Hakim Ammarul. Hubungan Kecerdasan Emosional dan Toleransi Beragam di Indonesia: Pendekatan Kualitatif untuk Pemahaman Sosial, Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora, Vol. 4 No. 3, September 2024.
- Aminulloh, Muhammad Rifqi Arif. Motif Beragama Pada Keluarga Bea Agama (Studi di Kelurahan Kranji Purwokerto Timur Banyumas), Purwokerto: 2019.
- Apriyanti, Yoki, et.al. Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Jurnal Professional FIS UNIVED, Vol.6, No.1 Juni 2019.
- Arifin, Bambang Syamsul. Psikologi Agama, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Tahun 2023.
- Bahri, Media Zainul, Wajah Studi Agama-Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelaja 2015.

- Bertens, K. Psikoanslisis Sigmund Freud, Jakarta: Gramedia, 2016.
- Carsam. Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, New Delhi: SAGE Publications, 2014.
- Fawaid, Muhammad Asral. Kebebasan Beragama Dalam Keluarga Multi Agama, Surabaya: 2019.
- Gumiri, Erika Rahman. Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama di Kota dan Kabupaten Malang, Lampung: 2020.
- Harahap, Syahrin Teologi Kerukunan. Cetakan Pertama, Jakarta: Prenada 2011.
- Hasanah, Hasyim. Teknik-Teknik Observasi, Jurnal At-Taqaddam, Vol 8, No. 1, Juli 2016.
- Hisyam, Ciek Julyati, et al. "Menilik Budaya Penjara: Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim." Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 1.3 (2023).
- Huda, Misbakhul Kehidupan keberagamaan dalam keluarga beda agama (islam-khatolik) (desa caturtunggal depok sleman Yogyakarta). Yogyakarta: 2004.
- Huda, Misbakhul, Kehidupan Keberagamaan Dalam Keluarga Beda Agama (Islam-Khatolik): Desa Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta, Yogyakarta: 2004.
- Ira, Maulana. Urgensi Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam, Journal of Legal and Cultur Analutics, 2022
- Ismail, Faisal. Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Ismail, Muhammad Ilyas. Evaluasi Pembelajaran (Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, Dan Prosedur). Depok: 2020.
- Istikmaliya, Nuril. "Kehamonisan keluarga beda agama perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow (Studi di Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan)", Malang: 2018.
- Jalaluddin, Psikologi Agama. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. Sosiologi Perdesaan. Surakarta: Pustaka Setia 2015.
- Junita Br. Surbajti, Asim: Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Menurut Tarmizi Taher, Nazharat: Vol. 26 No. 01, Juni 2020.
- Kementerian Agama. Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama. Jakarta: Kementerian Agama, 2012.

- Khoiruddin, Muhammad Arif. Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam, Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol 25 No. 2, September 2014.
- Lexy J, Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Lubis, Ridwan, M. Buku Ajar Merawat Kerukunan Pengalaman Indonesia. Jakarta: UIN Jakarta Press 2018.
- Lubis, Ridwan, M. Cetak Biru Peran Agama. Jakarta: Puslitbang, 2005.
- Lubis, Ridwan, M. Kerukunan Beragama dalam Cinta dan Fakta. Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama {PKUB}, 2016.
- Lubis, Ridwan, M. Merawat Kerukunan Pengalaman di Indonesia. PT Elex Media Komputindo: 2020.
- Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Maradjabessy, M. Fandi dkk. Interaksi Sosial Forum Mahasiswa Kota Tidore Kepulauan di Kota Manado, Jurnal Holistik, Vol. 12 No. 1, Januari-Maret 2019.
- Masykuri Abdilah, Merawat Kerukunan Umat Beragama. Sekolah Pasca Sarjana Graduate Shcool, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Munawir, Relasi Psikologi dan Agama, STAIN Purwokerto, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Murdiyatmoko, Janu. Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- Mursyid, Hasbullah, et.al. Komplikasi Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Antar Umat Beragama. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama 2008.
- Musahadi. HAM, Mediasi dan Konflik di Indonesia. Semarang: WMC 2007.
- Narwoko, D., & Suyanto, B. Sosiologi Teks dan Pengantar Terapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nifasri, et. al., 20 Tahun Pusat Kerukunan Umat Beragama: Kiprah dalam Penguatan Kerukunan dan Moderasi Beragama di Indonesia, Jakarta: PKUB, 2021.
- Putri, Pasca Dwi, et.al, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Kesehatan di Kota Gunung Sitoli: Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina (PERSERO) Marketing Operating Region (MOR) I-Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Gunung Sitoli, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 24, No.03, Jul-Sep 2018.
- Qomariyah, Puji, Teori Ringkas Sosiologi. Jogjakarta: Pustaka Pelajar 2008.
- Rahman, Abdul. Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi

- Kalimantan Barat, Jurnal Menejemen Pembangunan Institusi Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. 5, No.1/ Juni 2018.
- Rohmah, Uyuunur. Toleransi Dalam Beragama Sebagai Bentuk Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Artikel Formadiksi Universitas Negeri Malang, 25 Des 2023.
- Rusydi, Ibnu dan Siti Zolehah. Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesian, Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Saifuddin, Ahmad. Psikologi Agama Implementasi Psikologi untuk Memahami Prilaku beragama, Jakarta Timur: 2020.
- Sairin, Weinata. Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa : Butir- Butir Pemikiran, Jakarta: Gunung Mulia, 2011.
- Sanapiah, Faisal. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: PT Raja Gramindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono. Peranan Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.
- Solekhan, Moch. Penyelenggara Pmerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara 2012.
- Sugiman, Pemerintah Desa, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1, Juli 2018.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Suwaryo, Utang dkk,. BMP IPEM4427–Sosiologi Pemerintahan (Edisi 3). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020.
- Syawal, Helaluddin Syahrul. Psikoanalisis Sigmund Freud dan Implikasinya dalam Pendidikan, <https://osf.io/582tk/download> .
- Taules, Robert H. Pengantar Psikologi Agama, Tej. Machnun Husein, Jakarta: CV Rajawali, 1992.
- Turama, Akhmad Rizqi. "Formulasi teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons." EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies 2. 1 (2020).
- Wahid, Abdurrahman dkk, Dialog: Kritik & Identitas Agama, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1993.
- Yewangoe, Andreas A. Agama dan Kerukunan. Jakarta: Gunung Mulia, 2009.